

## DAFTAR PUSTAKA

- An-nat, B. 1993. *Implementasi Kebijakan Penanganan PKL : Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI Jakarta*. Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rincka Cipta.
- Dahriani. 1995. *Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group
- Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: PT. Apollo
- J.S Badudu dan Z.M Zain. 1991. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Gramedia
- Koentjoroningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Plano, Jack C., Robert E. Rights & Hellena S. Robin, 1998. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali Pers, terjemahan oleh edi S. Siregar. Jakarta: cetakan ke-2
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2002 *Metode Penelitian Survey*, LP3S, cet ke-2
- Soekanto, Soejono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soetandoyo, Wignjosoebroto. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Surabaya: Bayumedia.
- Sondang, P, Siagaan. 1990. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suyanto Nurhadi. 2004. *Ekonomi untuk SMP Kelas VIII*. Jakarta: PT. Erlangga
- W.J.S Poerwadarminta. 1989. *Ketentraman Kota*. Jakarta: Rajawali Press

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Ketertiban

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

[http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah)